

POLA REKRUTMEN KADER PARTAI POLITIK (STUDI PADA PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI)

I Made Asthi Hendrawan Satria Wibawa
NPP. 29.1215
Asdaf Kabupaten Bangli, Provinsi Bali
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: satriaawib@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *In a democracy, political parties place their representatives in political positions through general elections. In this regard, political parties need to prepare their nominated candidates by carrying out political recruitment. However, recruitment carried out by political parties seems pragmatic by prioritizing results over process. One of them is the GOLKAR Party of Bangli Regency carrying out candidates for Regent and Deputy Regent who are candidates from outside the party and already have support from the community. **Purpose:** The purpose of this study was to describe the recruitment pattern of the GOLKAR Party, Bangli Regency, Bali Province. **Method:** The method in this research is qualitative. This study analyzed using Barber's recruitment theory (1965) with three dimensions, namely motivation, resources, and opportunities. Data collection techniques were carried out through interviews and documentation studies. **Result:** The results showed that the recruitment of the GOLKAR party was carried out openly to become new members of the GOLKAR party and candidates for Regent/Deputy Regent. On the other hand, the recruitment of candidates for DPRD members is carried out behind closed doors to internal cadres. **Conclusion:** Pragmatic recruitment is caused by internal factors for the failure of regeneration that has quality human resources. In addition, external factors are the tendency of parties to choose candidates who have community support.*

Keywords: *Golongan Karya Party, Political Recruitment, Pragmatism*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam negara demokrasi, partai politik menempatkan perwakilannya pada jabatan politik melalui pemilihan umum. Sehubungan dengan hal tersebut, partai politik perlu menyiapkan calon yang diusung dengan melaksanakan rekrutmen politik. Namun demikian, rekrutmen yang dilakukan partai politik terkesan pragmatis dengan mengutamakan hasil daripada proses. Salah satunya seperti Partai Golongan Karya Kabupaten Bangli dalam mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan kandidat dari luar partai dan telah memiliki dukungan dari masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan pola rekrutmen partai Golongan Karya Kabupaten Bangli Provinsi Bali. **Metode:** Metode dalam penulisan ini adalah kualitatif. Dalam penulisan ini dianalisis menggunakan teori rekrutmen Barber (1965) dengan tiga dimensi yaitu motivasi, sumber daya dan kesempatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penulisan menunjukkan bahwa rekrutmen partai Golongan Karya dilaksanakan secara terbuka untuk menjadi anggota baru partai GOLKAR dan

calon Bupati/Wakil Bupati. Sebaliknya dalam rekrutmen calon anggota DPRD dilaksanakan secara tertutup bagi kader internal. **Kesimpulan:** Rekrutmen yang pragmatis disebabkan faktor internal atas gagalnya kaderisasi yang memiliki kualitas sumber daya manusia. Di samping itu faktor eksternal yaitu adanya kecenderungan partai memilih kandidat yang mempunyai dukungan masyarakat.

Kata kunci: Partai Golongan Karya, Pragmatis, Rekrutmen Politik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sebuah negara demokrasi, partai politik memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Sedemikian pentingnya dalam demokrasi sehingga disebutkan oleh Schattschneider bahwa, “*political parties created democracy and modern democracy is unthinkable save in terms of the political parties*”. Dalam konteks ini partai politiklah yang membuat suatu demokrasi dan politik modern berkembang serta memikirkan hal strategis. Agenda-agenda politik dalam suatu negara sulit terpikirkan kecuali dalam partai politik. Tingginya peran dan fungsi partai diharapkan semakin baiklah demokrasi dalam negara tersebut. Pemilihan umum merupakan sarana dalam proses penegakan demokratisasi di Indonesia. Pemilihan umum memberikan kesempatan kepada seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk ikut terlibat dalam proses politik baik sebagai pemilih, kontestan pemilu hingga penyelenggara pemilu yang berimplikasi pada keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem politik yang demokratis, partai politik sebagai sarana penghubung pemerintah dan masyarakat dengan melaksanakan fungsi-fungsi partai politik yaitu; sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik. Salah satu fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik merupakan proses yang dijalankan partai politik dalam mencari dan mengajak kader yang memiliki ketertarikan dan bakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kader-kader politik baru ini diambil dari masyarakat dengan harapan dapat menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. Rekrutmen politik menjaga kesinambungan dan kelestarian suatu partai sekaligus menyeleksi dan menyiapkan calon pemimpin sebagai pelaksana eksekutif maupun pelaksana legislatif baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah melalui pemilihan umum.

Dalam pelaksanaan pemilu terdapat banyak fenomena mengenai penyiapan kader oleh partai politik. Salah satu fenomena yang sering terjadi yaitu fenomena politisi pindah partai menjelang pemilihan umum. Menurut Ikrar Nusa Bhakti yang merupakan pengamat politik dan guru besar riset dari LIPI, politisi dengan perhitungan pragmatis dengan mudah berpindah partai menjadi permasalahan besar dalam perpolitikan di Indonesia. Tindakan pindah partai ini dapat merusak rantai kaderisasi partai yang ditinggalkan maupun partai penerima. Pada partai yang ditinggalkan, rantai kaderisasi yang sudah dibangun lama akan terputus karena berpindahnya kader yang disiapkan tersebut. Pada partai penerima, kader-kader lama yang telah disiapkan akan merusak jenjang karier dengan masuknya politisi baru dengan popularitas lebih tinggi.

Fenomena pragmatisme dalam rekrutmen politik ini banyak terjadi di berbagai partai politik baik dari tingkat nasional hingga ke tingkat daerah. Fenomena ini salah satunya terjadi pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. Sebagian dari politisi tersebut bernasib baik dengan terpilihnya menduduki kursi legislatif. Namun sebagian politisi pindah partai yang bernasib tidak baik. Dari hasil Pemilihan Legislatif tahun 2019 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum terpilih 575 anggota DPR. Sebanyak enam legislator periode 2014-2019 yang terpilih kembali dengan kartu keanggotaan partai yang berbeda. Berikut nama-nama legislator yang menggunakan partai politik berbeda:

Tabel 1. 1 Legislator yang Menggunakan Partai Politik Berbeda Dalam Pemilihan Legislatif DPR RI Tahun 2019

Nama Legislator Terpilih	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara	Partai Politik	
			2014	2019
Rudi Hartono Bangun	Sumut III	45.814	DEMOKRAT	NASDEM
Fauzi Amro	Sumsel I	84.956	HANURA	NASDEM
Achmad Dimiyati Natakusumah	Banten I	67.150	PPP	PKS
Sri Wulan	Jateng III	88.023	GERINDRA	NASDEM
Tina Nur Alam	Sultra	39.076	PAN	NASDEM
Robert Rouw	Papua	274.426	GERINDRA	NASDEM

Sumber: Bisnis.com (KPU, DPR, 2019)

Fenomena lainnya juga terjadi pada pemilihan umum legislatif tingkat daerah seperti yang terjadi di provinsi Bali. Berikut nama-nama politisi di Bali yang pindah keanggotaan partai dalam mengikuti kontestasi pemilihan legislatif:

Tabel 1. 2 Nama Politisi Pindah Partai Dalam Pemilihan Legislatif DPRD di Bali Tahun 2014 dan 2019

Nama Politisi	Kabupaten/Kota	Partai Asal	Partai Tujuan	Tahun Pileg
Ketut Nugrahita Pendit	Tabanan	PDIP	GERINDRA	2014
Kade Oka Arianta	Tabanan	PDIP	HANURA	2014
I Gede Wayan Sutarja	Tabanan	PDIP	HANURA	2014
I Gusti Made Kartika	Tabanan	DEMOKRAT	GERINDRA	2014
I Wayan Sukaja	Tabanan	PDIP	HANURA	2014
I Gusti Made Sumadiyoga	Tabanan	PDIP	HANURA	2014
I Wayan Sukaja	Tabanan	GOLKAR	NASDEM	2019
I Nengah Sudiarta	Karangasem	DEMOKRAT	HANURA	2019
I Made Mustika	Karangasem	DEMOKRAT	HANURA	2019
I Wayan Ratna	Karangasem	DEMOKRAT	HANURA	2019
I Ketut Pasek Denia	Karangasem	DEMOKRAT	HANURA	2019
A.A. Ngruh Gede Widiada	Denpasar	GOLKAR	NASDEM	2014

Sumber: NusaBali.com, Liputan6.com, Detik.com, 2021, diolah

Tidak hanya pada pemilihan legislatif, fenomena pragmatisme rekrutmen partai politik juga terjadi pada pemilihan umum kepala daerah (PILKADA) seperti yang terjadi pada PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Bangli Provinsi Bali tahun 2020. Salah satu pasangan calon yang diusung oleh partai Golongan Karya, sebelumnya merupakan kader PDIP namun karena adanya perbedaan kepentingan sehingga memutuskan pindah partai ke partai Golongan Karya dan maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2020.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas menunjukkan belum maksimalnya fungsi partai politik dalam rekrutmen kader politik terutama kader yang memang dipersiapkan partai, sehingga menarik untuk dilakukan penulisan mengenai rekrutmen partai politik dalam skripsi dengan judul **Pola Rekrutmen Kader Partai Politik (Studi Pada Partai Golongan Karya Kabupaten Bangli Provinsi Bali)**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Salah satu fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik merupakan proses yang dijalankan partai politik dalam mencari dan mengajak kader yang memiliki ketertarikan dan bakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kader-kader politik baru ini diambil dari masyarakat dengan harapan dapat menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. Rekrutmen politik menjaga kesinambungan dan kelestarian suatu partai sekaligus menyeleksi dan menyiapkan calon pemimpin sebagai pelaksana eksekutif maupun pelaksana legislatif baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah melalui pemilihan umum. Dapat dikatakan bahwa partai politik perlu menyiapkan kader politik melalui kaderisasi maupun rekrutmen yang diutamakan generasi muda sehingga dapat menyediakan calon pemimpin negara di masa yang akan datang.

Dalam realitasnya, banyak partai politik di Indonesia yang menjalankan fungsi rekrutmen politik secara pragmatis. Partai politik lebih mengutamakan hasil tanpa memandang proses yang dilalui. Partai politik merekrut kandidat yang telah memiliki dukungan ataupun sumber daya yang mencukupi walaupun kandidat tersebut berasal dari luar partai dan bukan kandidat yang memang dipersiapkan oleh partai politik itu sendiri. Termasuk yang terjadi pada partai Golongan Karya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangli tahun 2020. Kandidat yang dicalonkan merupakan politisi yang pindah partai dari PDIP ke Partai GOLKAR menjelang pemilihan kepala daerah. Ini menunjukkan kurang maksimalnya peran partai politik dalam menyediakan calon kandidat yang memang dipersiapkan partai dalam mengikuti pemilihan umum.

1.3. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan tema rekrutmen politik, telah banyak dilakukan penulisan sebelumnya seperti halnya oleh Ilhamsyah dari Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2019 dengan judul Pola Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo. Kemudian oleh Amaliya Hidayatul Fajrina dari Universitas Airlangga pada tahun 2017 dengan judul Strategi Rekrutmen Partai GERINDRA dalam kaderisasi Pemuda di Kota Surabaya. Namun demikian mereka menyoroti aspek pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik (PSI dan Partai GERINDRA) dalam merekrut generasi muda.

Penulisan sebelumnya terkait rekrutmen politik juga dilakukan oleh Hasan Basri dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020 dengan judul Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Pada Pemilu 2019 yang membahas dari aspek rekrutmen politik perempuan dalam pencalonan legislatif. Penulisan lainnya terkait rekrutmen partai politik yang dilakukan oleh Fitriyah dari Universitas Diponegoro pada tahun 2020 dengan judul Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menyoroti dari aspek proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik dalam menyuburkan praktik politik dinasti.

Penulisan lainnya terkait rekrutmen politik oleh Dede Sibagariang, Ketut Putra Erawan, dan Muhammad Ali Azhar dari Universitas Udayana pada tahun 2019 dengan judul Pola Rekrutmen PDIP, NASDEM, dan PSI Dalam Pemilihan Caleg DPRD di Kota Denpasar yang lebih menyoroti pada aspek perbandingan pola rekrutmen yang dilakukan oleh PDIP sebagai partai politik tua, NASDEM sebagai partai politik muda dan PSI sebagai partai politik sangat muda.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, konteks penelitian yang dilakukan terkait rekrutmen politik yang menyoroti pragmatisme dalam rekrutmen menjelang pemilihan umum yang dilakukan oleh partai politik. Selain itu teori yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Teori Model Rekrutmen Barber (1965) yang

menyatakan bahwa terdapat tiga aspek yang mempengaruhi dalam rekrutmen politik yaitu: motivasi, sumber daya, dan kesempatan. Teori yang digunakan akan menentukan dimensi/indikator dalam pengukuran penelitian yang dilakukan.

1.5. Tujuan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pola rekrutmen kader yang dilakukan oleh partai politik Golongan Karya di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

II. METODE

Dalam melaksanakan penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan penulisan deskriptif dengan metode kualitatif karena sumber data maupun hasil penulisan ini berupa kata-kata yang menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal yang apa adanya. Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis induktif. Analisis induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dibuat pertanyaan, kemudian dihubungkan dengan teori, dalil atau hukum yang sesuai pernyataan hingga disimpulkan. Melalui desain penelitian ini, penulis dapat menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang Pola Rekrutmen Kader Partai Politik Golongan Karya di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan pemilihan informan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu mengambil sampel dengan tujuan tertentu karena memiliki alasan tertentu seperti dianggap mengetahui informasi yang diperlukan sehingga terpilih 5 (lima) orang informan yang terdiri dari Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Bangli, Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai GOLKAR Kabupaten Bangli, Kepala Desa sekaligus Tokoh adat Batukaang Kecamatan Kintamani, Bangli, Ketua Karang Taruna Desa Catur Kecamatan Kintamani, Bangli dan Pemudi Desa Batukaang Kecamatan Kintamani, Bangli.

Data ataupun informasi yang didapatkan dilakukan validasi data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman (1984) yang meliputi aktivitas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan pola rekrutmen partai Golongan Karya di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, penulis menganalisis menggunakan Teori Model Rekrutmen Barber (1965) yang memiliki tiga dimensi terdiri dari: Motivasi, Sumber Daya, dan Kesempatan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Motivasi dalam Rekrutmen Politik

Motivasi diartikan sebagai dorongan yang dimiliki oleh individu sebagai alasan atau pemicu seseorang melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu. Motivasi dalam rekrutmen politik partai Golongan Karya terdapat dua indikator yang menjadi pembahasan pada penulisan ini yaitu visi dari calon rekrutmen politik dan harapan terhadap calon rekrutmen politik.

3.1.1. Visi Calon Rekrutmen

Setiap kandidat memiliki visi-misi yang dibawanya dalam mengikuti rekrutmen politik namun partai Golongan Karya tidak mempermasalahkan visi tersebut. Visi dari bakal calon nantinya akan mendapatkan masukan-masukan dari partai sehingga terjadi keselarasan dengan visi partai Golongan Karya. Dapat dikatakan visi dari bakal calon rekrutmen tidak memiliki peranan yang signifikan dalam

rekrutmen politik karena nantinya akan mendapatkan penyempurnaan dan penyesuaian dalam partai Golongan Karya.

3.1.2. Harapan Terhadap Calon Rekrutmen

Dalam keikutsertaan pada pemilihan umum, seorang yang mengikuti rekrutmen politik membawa harapan dari masyarakat. Harapan-harapan tersebut disandarkan kepada bakal calon yang menjadi rekrutmen politik karena mereka memiliki kesempatan yang luas dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Harapan dari masyarakat tersebut didasarkan pada adanya kedekatan antara masyarakat dengan bakal calon rekrutmen politik.

Harapan juga bersumber dari partai politik. DPD Partai GOLKAR Kabupaten Bangli mendorong kader-kader internal partai serta organisasi sayap partai yang maju dalam pencalonan DPRD dan Bupati. Harapan dari partai politik tersebut didasarkan pada kapabilitas dan sumber daya dari rekrutmen politik yang dianggap mampu untuk bersaing dalam pemilihan umum dengan adanya kesempatan dari partai politik dan dukungan masyarakat yang dimiliki oleh rekrutmen politik tersebut. Dari kedua indikator tersebut, dapat dikatakan dimensi motivasi tidak memiliki peranan signifikan dalam rekrutmen politik karena nantinya motivasi dari kandidat akan mendapatkan penyesuaian dengan partai GOLKAR serta partai GOLKAR mendorong kadernya untuk ikut rekrutmen politik, namun keikutsertaan lebih lanjut dikembalikan kepada kandidat dan tetap mengikuti proses yang telah ditetapkan partai GOLKAR.

3.2. Sumber Daya dalam Rekrutmen Politik

Sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi. Sumber daya dalam Rekrutmen Politik Golongan karya membahas 2 (dua) indikator yaitu kemampuan yang dimiliki oleh bakal calon rekrutmen politik dan pengalaman yang dimiliki oleh bakal calon rekrutmen politik

3.2.1. Kemampuan Calon Rekrutmen Politik

Dalam mengukur kemampuan calon rekrutmen politik setidaknya terdapat tiga faktor di antaranya pendidikan, ketokohan dan finansial. Gabungan dari ketiga faktor ini berdampak pada dukungan masyarakat dan dukungan partai politik terhadap bakal calon yang bersangkutan. Memang tidak semua mutlak harus dimiliki oleh bakal calon namun ini menjadi pertimbangan dalam rekrutmen untuk menentukan bakal calon yang diusung oleh partai Golongan Karya.

Berikut disajikan tabel tingkat pendidikan calon DPRD Kabupaten Bangli dari partai Golongan Karya.

Tabel 4. 1 Tingkat Pendidikan Calon DPRD Kabupaten Bangli dari partai Golongan Karya

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Strata 3 (S3)	1
Strata 2 (S2)	0
Strata 1 (S1)	9
Diploma 3 (D3)	0
Sekolah Menengah Atas (SMA)	20
Total	30

Sumber: Diolah Penulis, 2022

Berdasarkan data dalam tabel di atas terkait tingkat pendidikan yang pernah ditempuh bakal calon rekrutmen partai Golongan Karya, rata-rata memiliki jenjang pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) namun terdapat juga sebanyak 10 (sepuluh) calon DPRD Kabupaten Bangli dari partai Golongan Karya yang memiliki jenjang pendidikan di atas Sekolah Menengah Atas (SMA). Padahal dalam persyaratan menjadi bakal calon anggota DPRD disebutkan tingkat pendidikan minimal Diploma 3 (D3) memiliki tujuan agar anggota DPRD nantinya memiliki kedewasaan Jasmani dan Rohani serta dapat mengerti dan mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Ketokohan berkaitan dengan adanya pengakuan baik itu dari masyarakat maupun pemerintah terhadap seseorang yang memiliki peran, fungsi ataupun berjasa dalam suatu bidang dan skala tertentu. Ketokohan bukan menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki tetapi menjadi nilai lebih dalam proses rekrutmen dan pemilihan umum yang diikuti. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kader partai GOLKAR Kabupaten Bangli masih sedikit yang memiliki kapabilitas sebagai politisi ditunjukkan dengan masih sedikitnya kader partai GOLKAR yang mendapat pengakuan dari masyarakat.

Finansial diperlukan untuk mengikuti rekrutmen partai Golongan Karya, bakal calon perlu memiliki modal finansial untuk membiayai kegiatan dan operasionalnya selama masa kampanye. Untuk maju dalam pencalonan legislatif maupun kepala daerah setidaknya bakal calon yang bersangkutan tidak memiliki permasalahan finansial. Finansial tersebut juga menjadi kendala bagi kader yang memiliki kapabilitas namun terkendala masalah finansial sehingga tidak dapat maju dalam pemilihan umum.

3.2.2. Pengalaman Calon Rekrutmen

Pengalaman diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami, dijalani ataupun dirasakan. Pengalaman ini menjadi nilai tambah dalam rekrutmen partai GOLKAR sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat dan partai GOLKAR. Tanpa adanya pengalaman dalam mengelola organisasi ataupun pekerjaannya maka sulit untuk langsung mengelola pemerintahan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Terlebih dengan pengalaman tersebut membuat calon bersangkutan dapat dikenal oleh masyarakat terutama yang berhubungan dengan organisasi dan pekerjaannya.

Dimensi sumber daya menjadi penilaian terhadap individu sebagai pertimbangan dalam rekrutmen partai GOLKAR. Penilaian individu mengenai indikator kemampuan dan pengalaman maka berimplikasi terhadap kualitas rekrutmen. Penilaian yang baik terhadap calon rekrutmen ini juga berdampak terhadap terpilihnya calon rekrutmen dari partai GOLKAR dalam pemilihan umum yang diikutinya. Akan tetapi secara umum masih banyak yang memiliki kualitas yang kurang dilihat dari pendidikannya, masih sedikitnya kader yang mempunyai kapabilitas sebagai politisi dan kendala finansial yang dapat menghambat jenjang karier kader.

3.3. Kesempatan dalam Rekrutmen Politik

Kesempatan di sini membandingkan kesesuaian antara kriteria pemilihan ataupun standar-standar pemilihan dengan kemungkinan dari hasil pemilihan umum yang memiliki tingkat ketidakpastian. Kesempatan dalam rekrutmen politik partai Golongan Karya terdapat dua indikator yang menjadi pembahasan pada penulisan ini yaitu kesempatan dari partai politik dan dukungan dari masyarakat.

3.3.1. Kesempatan dari Partai

Dalam indikator kesempatan dari partai politik dapat dikatakan bahwa peranan partai politik menjadi sangat penting dengan melakukan penyediaan anggota baru untuk menjaga keberlangsungan partai politik dan penyediaan calon yang mengikuti pemilihan umum baik DPRD maupun kepala daerah. Penyediaan dan penjangkaran ini ditujukan kepada setiap warga negara Indonesia yang berkeinginan menjadi anggota partai GOLKAR dan ikut berpartisipasi dalam pemilu melalui kendaraan partai GOLKAR. Pada penyediaan anggota baru partai dan kandidat Kepala Daerah dilaksanakan secara terbuka sedangkan dalam penyediaan kandidat DPRD dilaksanakan secara tertutup yang diikuti hanya kader intern partai GOLKAR. Rekrutmen dilakukan berpedoman pada AD/ART Partai GOLKAR dan untuk teknis lebih lanjut diatur pada Surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor KEP-227/GOLKAR/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Nomor: JUKLAK-3/DPP/GOLKAR/II/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Partai politik memiliki peran yang dominan dalam proses rekrutmen karena partai politik yang membuka rekrutmen, melaksanakan rekrutmen termasuk persyaratan yang ditetapkan dan penjangkaran hingga penetapan hasil rekrutmen yang mengikuti

pemilihan umum. Dalam proses rekrutmen ini, elite politik memegang peranan penting dalam merekomendasikan dan menetapkan calon rekrutmen untuk berkompetisi dalam pemilihan umum.

3.3.2. Dukungan dari Masyarakat

Dukungan merupakan suatu yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk moril maupun materiil untuk memotivasi seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pada dasarnya untuk mendapatkan legitimasi dalam pemerintahan harus dipilih oleh rakyat pada daerah pemilihannya. Kandidat perlu memperhitungkan kemungkinannya ia akan terpilih dalam pemilihan umum tentu dengan melihat dukungan masyarakat di daerah pemilihannya.

Dari indikator dukungan dari masyarakat menunjukkan bahwa dukungan masyarakat memiliki peranan penting terhadap peluang kemenangan dalam pemilihan umum. Dukungan masyarakat ini dibutuhkan dalam proses rekrutmen partai Golongan Karya karena setelah melalui proses penjangkaran, calon bersangkutan akan berjuang memperebutkan suara di masyarakat untuk memenangkan pemilihan umum. Adanya dukungan yang kuat dari masyarakat menunjukkan bakal calon memiliki kesempatan untuk berkompetisi pada pemilu sehingga kecenderungan partai mengusung calon yang memiliki dukungan yang kuat tersebut.

Dimensi kesempatan memiliki peranan sangat penting dalam proses rekrutmen untuk menjadi bakal calon yang diusung partai Golongan Karya. Partai politik perlu melakukan penyediaan kandidat dalam mengikuti pemilihan umum dengan melaksanakan rekrutmen politik. Elite politik memiliki peranan penting pada kesempatan dari partai politik karena keputusan dan pertimbangan dalam proses rekrutmen diberikan oleh elite politik. Adanya dukungan masyarakat membuat kecenderungan elite politik mengusung calon walaupun dari luar partai Golongan Karya karena memiliki peluang yang besar dalam memenangkan pemilu sehingga rekrutmen politik terkesan pragmatis.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pola Rekrutmen yang diterapkan pada rekrutmen partai Golongan Karya Kabupaten Bangli yaitu bersifat terbuka pada rekrutmen anggota baru partai dan rekrutmen calon Kepala Daerah yang terbuka pada seluruh WNI yang memenuhi syarat. Namun dalam rekrutmen calon DPRD bersifat tertutup dengan membuka rekrutmen hanya dari internal partai GOLKAR. Adanya kesamaan dengan penelitian dari Amaliya Hidayatul Fajrina(2017) yang menemukan adanya rekrutmen secara terbuka namun terkadang adanya sistem patronik dan sistem figure dalam rekrutmen kader terutama generasi muda pada partai Gerindra di Kota Surabaya. Namun berbeda dengan penelitian dari Ilhamsyah (2019) yang menemukan adanya sistem terbuka dalam rekrutmen calon DPRD dari partai PSI di Kabupaten Wajo.

Dari ketiga dimensi yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa dimensi kesempatan memiliki peranan yang penting dalam proses rekrutmen politik karena berkaitan langsung dengan penyediaan bakal calon hingga ditetapkan sebagai calon yang diusung partai Golongan Karya serta dalam keikutsertaan pada pemilihan umum. Sedangkan dimensi sumber daya sering digunakan sebagai pertimbangan dalam rekrutmen partai Golongan Karya untuk melakukan penilaian terhadap individu yang berimplikasi pada kualitas sumber daya dan kapabilitas rekrutmen partai Golongan Karya. Namun pada dimensi motivasi tidak mempunyai peran yang signifikan dalam rekrutmen politik. Semua dikembalikan ke bakal calon masing-masing terkait motivasi asalkan bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan dari partai Golongan Karya. Temuan ini selaras dengan penelitian dari Hasan Basri (2020) yang menemukan bahwa rekrutmen politik mencakup tiga tahapan penting yaitu penjangkaran, penyaringan dan penetapan kandidat.

Dalam rekrutmen Bupati dan Wakil Bupati Bangli terkesan pragmatis yang disebabkan faktor internal dengan gagalnya kaderisasi dalam menghasilkan kader yang memiliki kapabilitas, kualitas sumber daya, dan adanya faktor finansial yang menjadi faktor penting dalam rekrutmen. Selain itu terdapat faktor eksternal yaitu adanya kecenderungan partai memilih kandidat yang telah memiliki dukungan

di masyarakat termasuk dari kader dari luar partai. Serupa dengan penelitian dari Fitriyah (2020) yang menemukan bahwa rekrutmen politik untuk pencalonan PILKADA oleh partai politik bersifat sentralistis dan informal, serta menggunakan pertimbangan pragmatis dengan menambahkan syarat kemampuan finansial dan tingkat elektabilitas calon, sehingga lebih memberi jalan bagi calon yang berlatar belakang dinasti.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan dalam pelaksanaan rekrutmen di lapangan masih terdapat ketidaksesuaian dengan pedoman yang ada sehingga berimplikasi pada kurangnya kualitas dan daya saing kandidat yang dihasilkan dalam pemilihan umum. Hal ini dikarenakan kuatnya pengaruh elite politik dalam pelaksanaan rekrutmen politik. Selain itu kualitas sumber daya yang tersedia belum optimal sehingga rekrutmen yang dilaksanakan dan dihasilkan masih belum optimal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bangli, penulis menyimpulkan mekanisme rekrutmen oleh Partai Golongan Karya telah dilakukan sesuai dengan AD/ART Partai yang bersifat terbuka dan tertutup. Pada rekrutmen terbuka, Partai Golongan Karya membuka rekrutmen seluas-luasnya kepada Warga Negara Indonesia yang ingin menjadi anggota partai Golongan Karya dan menjadi bakal calon Bupati/Wakil Bupati Bangli dari partai Golongan Karya sepanjang bersedia mematuhi ketentuan yang terdapat dalam partai Golongan Karya. Dalam rekrutmen Bupati dan Wakil Bupati Bangli terkesan pragmatis yang disebabkan faktor internal dengan gagalnya kaderisasi dalam menghasilkan kader yang memiliki kapabilitas, kualitas sumber daya, serta adanya faktor finansial yang dapat menghambat kader mengikuti rekrutmen dan faktor eksternal adanya kecenderungan partai memilih kandidat yang mempunyai dukungan masyarakat. Dalam rekrutmen politik untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Bangli bersifat tertutup yang semuanya berasal dari internal partai Golongan Karya. Dalam pelaksanaan rekrutmen di lapangan masih terdapat ketidaksesuaian dengan pedoman yang ada sehingga kurangnya kualitas dan daya saing dalam pemilihan umum.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang singkat sekitar 2 (dua) minggu. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu partai politik saja sebagai model studi kasus yang dipilih sehingga tidak dapat membandingkan dengan partai politik lainnya di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait pragmatisme partai politik, budaya politik masyarakat yang menyuburkan praktik pragmatisme politik dan kualitas rekrutmen politik dalam penyediaan calon pemimpin di Indonesia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bangli yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya Hidayatul. 2017. *Strategi Rekrutmen Partai Gerindra dalam kaderisasi Pemuda di Kota Surabaya*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Fitriyah. 2020. *Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. Semarang: Universitas Diponegoro

- Hasan Basri.2020. *Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Pada Pemilu 2019*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Huberman dan Milles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Ilhamsyah. 2019. *Pola Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- James D. Barber. 1965. *The Lawmakers: Recruitment and Adaptation to Legislative Life*. New Haven: Yale Press
- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya
- Ketut P. Erawan, dkk. 2019. *Pola Rekrutmen PDIP, NASDEM, dan PSI Dalam Pemilihan Caleg DPRD di Kota Denpasar*. Denpasar: Universitas Udayana
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2011. *Ketika Politikus dan Pejabat Jadi Kutu Loncat*. Diakses pada 30 Agustus 2021, dari <http://lipi.go.id/berita/single/Ketika-Politikus-dan-Pejabat-jadi-Kutu-Loncat/6335>
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Muhadam Labolo & Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- NusaBali.com. 2019. *Adik Bupati Bangli 'Tantang' Sedana Arta: Subrata-Kutha Parwata Maju Lewat GOLKAR di Pilkada 2020*. Diakses pada 16 September 2021, dari <https://www.nusabali.com/berita/62197/adik-bupati-bangli-tantang-sedana-arta>
- Saragih, Samdysara. 2019. *Hasil Pileg 2019: Daftar Politikus Kutu Loncat yang Kembali Masuk DPR*. Diakses pada 29 Agustus 2021, dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20190905/15/1144935/hasil-pileg-2019-daftar-politikus-kutu-loncat-yang-kembali-masuk-dpr>
- Schattschneider, 1942. *Party Government*. New York: Holt, Rinehart, dan Winston, hal. 1.
- Sugiyono.2013. *Metode Penulisan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik